



## **POLA KOMUNIKASI BIROKRASI SATGAS COVID -19 KABUPATEN GARUT DALAM PENANGANAN PANDEMI**

**Mulyaningsih**

Universitas Garut

### **Abstrak**

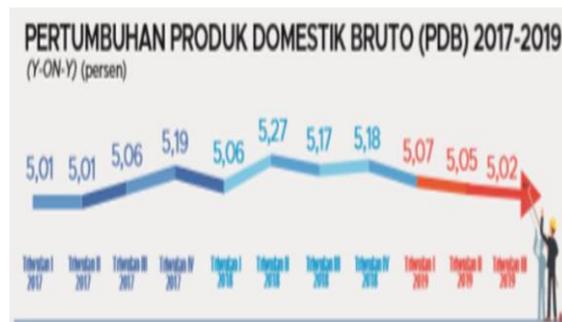
Secara sosiologis, pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan sosial pada semua aspek kehidupan masyarakat diberbagai sektor kehidupan masyarakat, baik dalam sektor ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, pariwisata termasuk pada aspek birokrasi pemerintahan. Birokrasi dan komunikasi tidak bias dan Keduanya menjadi bagian dari proses kegiatan organisasi, baik secara administratif maupun non-administratif. Pola komunikasi pada birokrasi dengan cara yang tepat dapat dipahami oleh semua pihak yang terkait. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan maksud untuk mengungkapkan secara komprehensif dan alami bagaimana pola komunikasi birokrasi dalam penanganan pandemi Covid-19 beserta pendukung dan penghambatnya di Kabupaten Garut dengan Satuan Tugas Covid-19 Garut sebagai implementor. Melalui pola komunikasi birokrasi vertikal dan horizontal kondisi pandemi berubah kearah yang lebih baik dengan indikator menjadi level 2 dari semula level 4 di kabupaten Garut.

**Kata Kunci:** Pandemi, Birokrasi, Pola Komunikasi Birokrasi Vertikal dan Horizontal

## **PENDAHULUAN**

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa yang menyebarkan penyakit Coronavirus 2019 (Coronavirus disease 2019, disingkat Covid-19) ke seluruh negara di dunia. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona jenis baru bernama SARS-CoV-2. Wabah Covid-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada 31 Desember 2019 ( Kompas, 2020 ) yang ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Secara sosiologis, pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan sosial pada segala aspek kehidupan masyarakat diberbagai sektor kehidupan masyarakat, baik dalam sektor ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, pariwisata termasuk pada aspek birokrasi pemerintahan. Tatanan baru dalam birokrasi dan perubahan pola kerja untuk melakukan pelayanan publik pada masa new normal. Kebijakan yang dirancang dan diterapkan oleh pemerintah setempat dengan menginstruksikan seluruh masyarakat untuk mulai melakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah atau Work From Home (WFH), kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan tujuan agar memutus rantai penularan Covid-19 yang ada di Indonesia saat ini (Warsono, 2020).

Pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi Covid-19 masih jauh dari harapan, Menurut Badan Pusat Statistik, kontribusi manufaktur pada tahun 2000 mencapai 27%, namun pada tahun 2019 hanya berkisar 19%. Pada sisi lain, pengembangan industri berbasis usaha mikro, kecil dan menengah yang ramah lingkungan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja terbukti mampu menumbuhkan perekonomian jauh lebih tinggi dari investasi usaha besar (BPS, 2019).



Sumber : Menpan. 2019

Kabupaten Garut saat ini mengalami minus sekitar 1,3 persen. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut pada tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu mencapai 262,78 atau 9,98%, meningkat 1% atau (263.000) sebanyak 235,19 atau 8,98 dibandingkan tahun 2019 %. Proporsi penduduk miskin masih lebih tinggi dari rata-rata Jawa Barat sebesar 8,43% dan lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 10,16%. Pada tahun 2020, Kabupaten Garut berada pada kuadran I. Jumlah penduduk miskin lebih tinggi dari rata-rata provinsi (145.200), dan tingkat kemiskinan yang tinggi, rata-rata (19.300 orang). Tentu hal ini tidak diharapkan oleh semua pihak, selain indeks pembangunan menurun juga dapat menimbulkan masalah sosial di masyarakat, seperti gizi buruk, kriminalitas dan sejenisnya ( BPS Garut, 2020 ). Pandemi Covid-19, menjadi tantangan bagi birokrasi untuk merumuskan langkah yang strategis membangkitkan ekonomi nasional. Birokrasi harus siap memperkuat pengawasan terhadap pemulihan ekonomi, terutama pascapandemi.

Birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya sejalan atau berkaitan dengan tujuan bersama yang ingin dicapai, digunakan untuk organisasi kerja yang teratur, seperti mesin terpenting dalam manajemen pemerintahan. Jika terjadi kemacetan atau kerusakan, dapat dibayangkan

pemerintahan itu sendiri, akan pincang, mogok bahkan berhenti menyelenggarakan pemerintahan. Kelambanan dalam pelayanan masyarakat, memiliki sistem manajemen yang buruk terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme serta permasalahan lainnya dalam tubuh birokrasi kita ( Risnawan, 2018 )

Birokrasi adalah suatu sistem pengelolaan organisasi besar untuk memperoleh pengelolaan yang efisien, wajar, dan efektif. Secara umum, birokrasi dalam masyarakat luas selalu terkait dengan segala kelambatan, kerumitan, dan segala prosedur. Ketika menyelesaikan urusan birokrasi (birokrat, pejabat pemerintah), Anda akan selalu menemui hambatan, membuang waktu dan tenaga, dan menunda penyelesaian semuanya. Jika memahami peran birokrasi, maka tugas-tugas yang dibebankan pada organisasi akan lebih tertib, dan tidak akan terjadi penyimpangan atau penyimpangan.

Perkembangan dan pertumbuhan masyarakat yang secara dinamis disertai dengan peningkatan taraf hidup dan pendidikan masyarakat ditambah dengan berkembangnya kemajuan di bidang teknologi dan informasi menjadikan peningkatan proses pemberdayaan lingkungan masyarakat menjadi penting. Oleh karena itu pelayanan bagian dari sektor publik juga diharapkan mengikuti perubahan yang terjadi secara cepat dan dinamis sebagaimana di masyarakat ( Siregar, 2011 )

Prioritas birokrasi di Indonesia saat ini adalah dalam hal kecepatan penyaluran dana bantuan sosial, kualitas pelayanan selama pandemi maupun hal-hal lain yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat menuntut pelaksanaan yang tanggap, sementara pada sisi lain penggunaan teknologi informasi untuk memperkuat digitalisasi pelayanan maupun bekerja dari rumah atau Working from Home (WFH)

berbenturan dengan karakter lama bersifat rule driven menghambat birokrasi untuk berubah secara lebih cepat, overload dan gap beban kerja pada tataran operasional dan pragmatis serta pola komunikasi yang tidak efektif dalam agenda-agenda perubahan new normal (Juwari, 2017). Aktualisasi birokrasi yang masih belum optimal terlihat pada beberapa permasalahan penyaluran bantuan sosial di kabupaten Garut yang menimbulkan kerumunan, telur bantuan sosial (bansos) sebanyak 4 ton dari provinsi yang berada di Gudang Bulog terlambat di salurkan sehingga sebagian membusuk yang seharusnya diterima oleh Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima bansos provinsi, program vaksinasi yang menimbulkan antrian yang panjang dan seterusnya menjadi bahan evaluasi dalam penataan birokrasi di Kabupaten Garut ( Warta Ekonomi, 2020 )

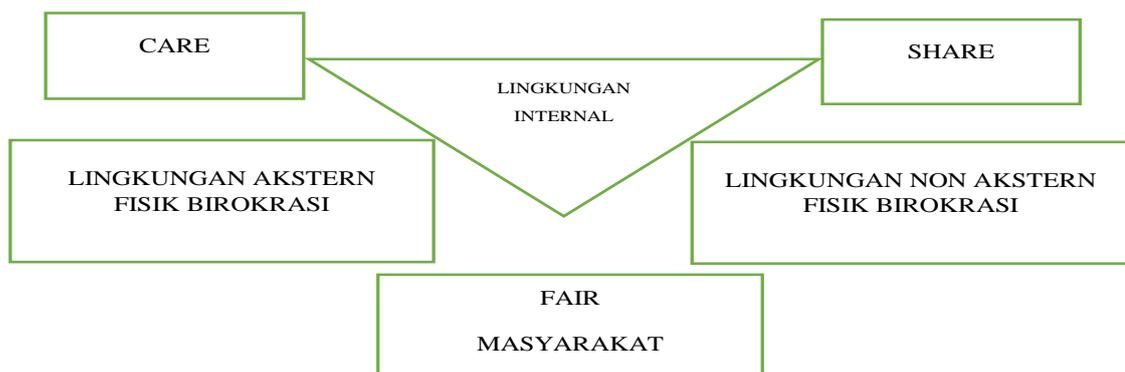
Birokrasi dan komunikasi tidak bisa terpisah masing masing. Keduanya menjadi bagian dari proses kegiatan organisasi, baik administratif maupun non-administratif. Melihat bahwa suatu organisasi, khususnya pemerintah, selalu membutuhkan interaksi dan informasi, baik untuk menerima maupun mengirimkan informasi, dan komunikasi menjadi kerangka untuk membangun birokrasi yang kompleks dan hierarkis. Untuk alasan ini, ada berbagai jenis model komunikasi organisasi yang beroperasi di dalamnya.

Pola komunikasi dapat diartikan sebagai pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami (Djamarah, 2004 ). Komunikasi pemerintahan berperan penting dalam penanganan pandemi Covid-19, setidaknya ada empat masalah utama komunikasi pemerintahan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, seperti kurang akuratnya data dan

informasi, minimnya sosialisasi terkait beberapa isu, rendahnya kepercayaan publik, serta kurang efektifnya komunikasi organisasi pemerintahan (Ardiyanti, 2020) . Hal tersebut mengisyaratkan peran regulasi yang jelas dan transparan pada setiap level birokrasi pemerintahan menjadi porsi yang tidak dapat dipungkiri eksistensinya.

Kualitas internal birokrasi pemerintahan melalui komunikasi kebijakan birokrasi dengan konsep “triangle concept of wisdom” yaitu nilai kepedulian (care), nilai sikap kebijakan (share) serta nilai keadilan dan

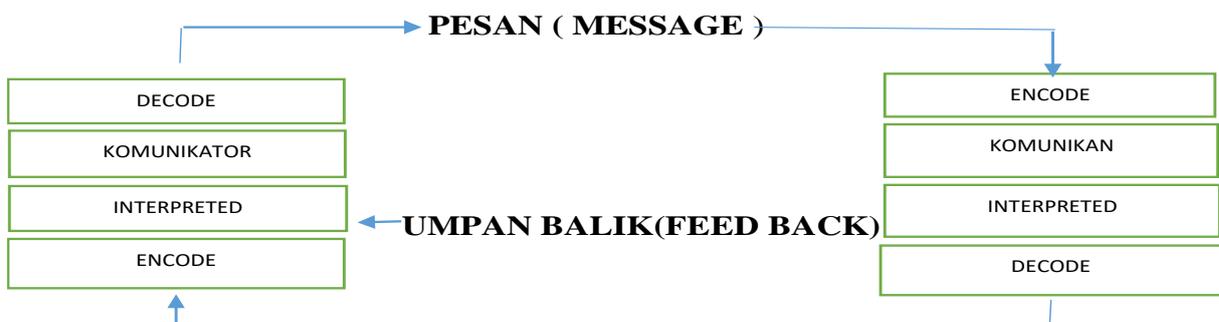
kepentingan umum (fair). Selanjutnya komunikasi yang efektif akan berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator cocok dengan kerangka acuan (frame of reference) yakni paduan pengalaman dan pengertian (collection of experience and meaning) yang pernah diperoleh komunikan. Dengan kata lain dalam proses komunikasi, komunikasi akan berlangsung apabila terjadi kesamaan makna dalam pesan yang diterima komunikan (Supriatna, 1997). Hal tersebut seperti yang digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1 : Pola Komunikasi Segi Tiga Kebijakan Publik Oleh Birokrasi Supriatna ( 1997 )**

Proses komunikasi antar manusia seperti yang digambarkan tersebut dalam konteks pelayanan publik yang berkualitas dan efektif bila aparatur birokrasi sebagai sumber informasi

memiliki kemampuan komunikasi yang baik, tersedianya sarana dan media yang memadai serta terbangunnya iklim komunikasi yang kondusif. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 2 : Proses Komunikasi ( Redi Panuju, 1999 )**

Adanya pemanfaatan media komunikasi dalam upaya mitigasi pandemi. Mitigasi pandemi yang dimaksudkan dalam penelitian tersebut adalah efektifitas media poster dalam mendorong social distancing, yang menjadikan perubahan perilaku dalam mencegah penularan COVID-19 melalui Edukasi media komunikasi dalam penanganan COVID-19 dimana menjadi hal baru bagi pemerintah dipengaruhi oleh ketersediaan akses jaringan, kemampuan dalam menangkap pesan secara virtual ataupun aksestabilitas media yang tidak merata. Keterbatasan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh keadaan geografis dan topografi daerah. Kabupatatan Garut dengan beberapa wilayah yang terjauh seperti pamengpeuk, simgajaya, pakenjeng atau mayoritas wilayah selatan secara acapkali sukar untuk dijangkau oleh media digital atau sejenisnya. Hal tersebut menghambat di dalam pelayanan publik dari sebuah kebijakan yang harus dilaksanakan oleh birokrat. Transparansi stimulus bansos maupun upaya penanggulangan dan percepatan pemulihan bencana pandemi mengalami hambatan- hambatan. Pelaku birokrasi tidak kalah pentingnya di dalam upaya pencegahan pandemi seperti program vaksinasi dimana masyarakat Garut masih minim informasi dan akses pelayanan yang terkadang menimbulkan antrian yang panjang dalam pelayanan yang terkadang menimbulkan antrian yang panjang dalam pelaksanaannya.

Agar penanganan pandemi covid-19 dapat terkoordinir dengan baik maka setiap daerah dibentuk Satuan Tugas Covid-19. Penanganan COVID-19 dan tugas penanganan COVID-19 di bawah Komite Pemulihan Ekonomi Nasional. Demikian ketentuan Panitia Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pemulihan perekonomian nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.

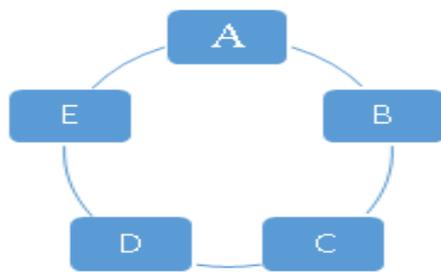
Tahun 2021, Pemerintah membentuk Satgas Pencegahan Covid-19 di Fasilitas Publik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020. Satgas Covid-19 merupakan kelompok kerja di bawah Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang tugas utamanya melaksanakan dan mengendalikan kebijakan strategis terkait Covid-19, serta menyelesaikan isu kebijakan strategis terkait Covid-19. Menangani virus secara cepat dan tepat, mengawasi kebijakan strategis terkait penanganan virus, merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menghadapi Covid-19.

Satgas covid-19 Kabupaten Garut berada pada dua instansi terkait yakni BPDB dan Dinas Kesehatan dengan SDM yang memiliki kapabilitas dan akuntabilitas. Topografi wilayah Kabupaten Garut yang unik dan bermacam level pendidikan seringkali menjadikan masyarakat kesulitan mengakses semua informasi tentang perkembangan pandemi ini terutama upaya pencegahan dan mobilitas prasarana yang sudah di sediakan sebagai public service dari pemerintah walaupun para petugas satgas sudah memiliki skill sesuai job description. Dalam hal tersebut maka sangat penting bagi birokrat untuk dapat melaksanakan pola komunikasi birokrasi yang efektif dengan harapan tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

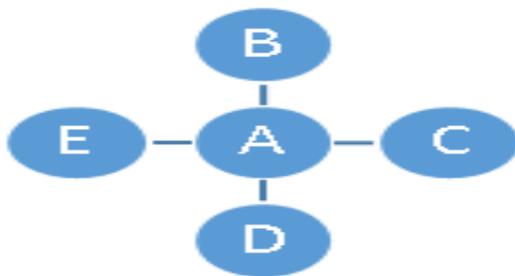
### **Kajian Pustaka Pola Komunikasi**

Produktivitas dan kinerja suatu organisasi pemerintah salah satunya dipengaruhi oleh kualitas komunikasi yang dibangun dalam kehidupan organisasi tersebut, karena organisasi yang didalamnya terdiri atas sejumlah orang, melibatkan keadaan saling bergantung, kebergantungan memerlukan koordinasi dimana

koordinasi mensyaratkan komunikasi. Katz dan Kahn (1987) menunjukkan bahwa pola atau keadaan urusan yang teratur mensyaratkan bahwa komunikasi di antara para anggota sistem tersebut dibatasi. Untuk lebih jelasnya tentang pola komunikasi tersebut dapat terlihat pada gambar di bawah ini :



**Pola Lingkaran**



**Pola Roda**

**Gambar 3 : Pola Komunikasi dari Katz dan Kahn**

Pola roda adalah pola yang mengarahkan seluruh informasi kepada individu yang menduduki posisi sentral. Orang-orang di lokasi pusat menerima kontak dan informasi yang diberikan oleh anggota lain dari organisasi, dan memecahkan masalah dengan saran dan persetujuan dari anggota lain. Pola melingkar memungkinkan semua anggota Mereka hanya dapat berkomunikasi satu sama lain melalui semacam sistem pengulangan pesan. Tidak ada anggota yang memiliki kontak langsung dengan semua anggota lainnya, dan tidak ada anggota yang memiliki akses langsung ke semua informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah.

Mangkunegara (2000) Pengertian komunikasi adalah proses pemindahan informasi, gagasan, dan pengertian dari seseorang kepada orang lain, dengan harapan orang lain dapat menafsirkannya sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan sarana pertukaran informasi dan pendapat dalam organisasi, masyarakat dan perusahaan yang memiliki tiga fungsi penting, yaitu pengambilan keputusan, komunikasi pengambilan keputusan, dan upaya perubahan sikap. Fungsi komunikasi dalam organisasi menurut Sendjaja (1994) adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi informatif dimana organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi.
- b. Fungsi Regulatif adalah fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi.
- c. Fungsi persuasif yang terdapat dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan.
- d. Fungsi integratif yakni setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan pegawai/karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik.

Menurut Djamarah (2004) Pola komunikasi dapat diartikan sebagai pola hubungan antara dua orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang diharapkan dapat dipahami. Sedangkan Gunawan mengemukakan (2013), Pola komunikasi adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengungkapkan realitas saling

ketergantungan dan kesinambungan unsur-unsur yang tercakup untuk mempromosikan pemikiran yang sistematis dan logis. Pola komunikasi adalah suatu gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya (Soejanto dalam Santi & Ferry: 2015). Oleh karena itu, mode komunikasi adalah mode hubungan yang dibentuk oleh beberapa elemen yang saling terkait dan saling melengkapi, serta bertujuan untuk memberikan gambaran tentang proses komunikasi yang sedang berlangsung.

Oleh karena itu, mode komunikasi adalah mode hubungan yang dibentuk oleh beberapa elemen yang saling terkait dan saling melengkapi, serta bertujuan untuk memberikan gambaran tentang proses komunikasi yang sedang berlangsung. Secara hirarkhis, menurut R.L. Simpson (Stephen P.R, 2006) dan Redding & Sanborn (Arni, 2005) komunikasi dalam organisasi mengalir dalam dua arah, yaitu vertical dan horizontal diantaranya :

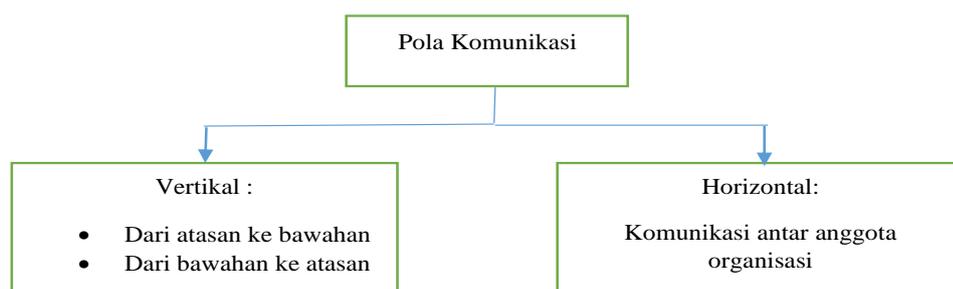
- Komunikasi Vertical, Dalam dimensi vertical dapat dibagi dalam dua arah, yaitu :
  - a. Dari Atasan Ke Bawahan (Downward Communication), Komunikasi yang terjadi ketika personel manajemen mengirimkan informasi kepada bawahan. Komunikasi dari tingkat atas ke tingkat berikutnya adalah komunikasi vertikal ke bawah, yaitu komunikasi antara atasan dan bawahan. Hal ini berupa pemberian instruksi kerja (job instruction); Penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu

tugas perlu untuk dilaksanakan (job reitionnale) penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku (procedures and practices) Pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. Komunikasi tersebut tidak selalu dilakukan secara verbal (kontak lisan) tetapi juga dilakukan secara non verbal, seperti surat, memo, laporan, disposisi, e-mail, SMS, dll.

- b. Dari Bawahan Ke Atasan (Upward Communication Komunikasi yang terjadi ketika bawahan (bawahan) mengirimkan informasi kepada atasan. Komunikasi mengalir dari staf tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi, dari eksekutif ke tingkat yang lebih tinggi, dan dari manajer/pejabat tingkat rendah ke manajer/pejabat tingkat yang lebih tinggi. Fungsi dari proses komunikasi dari bawah ke atas adalah untuk menyampaikan informasi tentang pekerjaan atau tugas yang telah diselesaikan, dan menyampaikan informasi tentang masalah pekerjaan atau tugas yang tidak dapat diselesaikan bawahan; menyampaikan saran perbaikan kepada bawahan; menambah referensi untuk pengambilan keputusan; meningkatkan apresiasi karyawan terhadap organisasi Dan loyalitas;

memahami apakah bawahan memahami arti pemimpin, dan menyampaikan keluhan bawahan tentang diri mereka dan pekerjaan mereka.

- Komunikasi Horizontal  
Fungsi arus komunikasi horizontal ini adalah memperbaiki koordinasi tugas upaya pemecahan masalah, saling berbagi informasi, upaya pemecahan konflik, membina hubungan melalui kegiatan bersama.



**Gambar 4. Pola komunikasi adaptasi dari R.L. Simpson (Stephen P.R, Redding, Sanborn, 2006)**

Suatu kebijakan akan efektif, apabila dilaksanakan dan mempunyai pengaruh positif bagi masyarakat atau organisasi masyarakat. Agar suatu organisasi dapat berfungsi secara efektif, menurut Winardi ( 2003 ) harus dipenuhi tiga macam kondisi atau syarat yaitu penyeleksian sasaran-sasaran, pengimplementasian alat-alat guna mencapai tujuan dan pengkoordinasian sumber daya manusia dan bahan-bahan.

Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme yang membantu dalam bentuk kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, metode-metode, dan standar-standar guna mengarahkan penilaian dan tindakan dalam hal mengimplementasikannya. Pola komunikasi dan iklim organisasi merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh para manajer/pejabat pada setiap jenjang organisasi pemerintahan, karena mempengaruhi sikap dan perilaku pegawai/pegawai. Untuk dapat menciptakan suasana komunikasi dan organisasi yang baik, maka perlu dirumuskan suatu kebijakan yang akan menjadi faktor pendorong untuk mencapai tujuan.

### **Birokrasi**

Menurut Max Weber Birokrasi adalah suatu sistem administrasi yang konvensional, diselenggarakan dengan cara tertentu menurut aturan tertulis oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing, dan dilaksanakan secara seragam. Adapun Rourke menyebutkan bahwa Birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas sehari-hari, tugas sehari-hari ini dilakukan dalam struktur hierarki yang jelas, dengan aturan tertulis (prosedur tertulis), dilakukan oleh departemen tertentu yang terpisah dari bagian lain, dan oleh mereka yang dipilih karena itu, Orang-orang mengeksekusi, Kemampuan dan keahlian di bidangnya masing-masing. Sementara Pfiffner dan Presthus mengemukakan birokrasi sebagai suatu sistem kewenangan, kepegawaian, jabatan dan metode yang dipergunakan pemerintah untuk melaksanakan program-programnya (Said, 2007). Birokrasi adalah struktur organisasi, diagram, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat dalam suatu organisasi,

yang penting untuk melaksanakan tugas secara lebih tertib.

Menurut Sulistiyani (2004), model birokrasi yang diajukan Weber memiliki karakteristik ideal sebagai berikut :

- a. Pembagian kerja, dalam menjalankan tugasnya, birokrasi membagi kegiatan-kegiatan pemerintahan menjadi bagian-bagian yang masing-masing terpisah dan memiliki fungsi yang khas.
- b. Hirarki wewenang, dalam hirarki itu setiap pejabat harus bertanggung jawab kepada atasannya mengenai keputusan-keputusan dan tindakan-tindakannya sendiri maupun yang dilakukan oleh anak buahnya.
- c. Pengaturan perilaku pemegang jabatan birokrasi, lingkup tanggung jawab para pemegang jabatan di berbagai posisi dan hubungan di antara

mereka yang menjamin koordinasi berbagai tugas yang berbeda dan menjamin keseragaman pelaksanaan berbagai kegiatan itu.

- d. Impersonalitas hubungan yang harus menghindarkan pertimbangan pribadi dalam hubungannya dengan bawahannya maupun dengan anggota masyarakat yang dilayaninya.
- e. Kemampuan teknis, jabatan-jabatan birokratik harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam jabatan itu.
- f. Karier, pekerjaan dalam birokrasi pemerintah adalah pekerjaan karier dalam kondisi tertentu, birokrat itu juga memperoleh jaminan pekerjaan seumur hidup.



Gambar. 5 Model Birokrasi Weber adaptasi dari Sulistiyani (2004)

### Satgas Covid -19

Tugas Penanganan COVID-19 yang berada di bawah Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Adapun tugas dan fungsi Gugus Tugas Penanganan Covid-19 adalah sebagai berikut:

- a. Dasar Pembentukan, telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan Covid-19 di Indonesia yang perlu diantisipasi

dampaknya. Untuk itu, dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

- b. Tujuan Pembentukan diantaranya adalah meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan, mempercepat penanganan Covid-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional dan meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap Covid-19
- c. Tugas Pokok antara lain, menetapkan dan melaksanakan rencana operasional, percepatan penanganan COVID-19, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19, melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19, mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden dan Pengarah.

### **Kabupaten Garut**

Secara administratif, sampai dengan tahun 2014 Kabupaten Garut mempunyai jumlah kecamatan sebanyak 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa. Terakhir kali pada tahun 2011 telah melakukan penambahan jumlah desa sebanyak 11 (sebelas) desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 s.d. 22 Tahun 2011. Kecamatan Cibalong merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah terluas mencapai 6,97% dari wilayah Kabupaten Garut atau seluas 21.359 Ha, sedangkan kecamatan Kersamanah merupakan wilayah terkecil dengan luas 1.650 Ha atau 0,54%.

Melihat kondisi wilayah yang demikian maka pemulihan ekonomi melalui pola komunikasi birokrasi yang efisien dan efektif menjadi suatu hal yang tidak dapat dipungkiri sebagai upaya dari pemerintah pusat terutama Kabupaten Garut khususnya dalam rangka penanganan dan percepatan pemulihan pandemi covid-19 yang telah masuk level 2. Mayoritas masyarakat mengharapkan aktivitas new normal yang lepas dari kekhawatiran akan wabah ini.

### **Pandemi**

Pandemi adalah suatu wabah penyakit global. Menurut World Health Organization (WHO), Ketika penyakit baru menyebar di luar batas dunia, pandemi dinyatakan. Wabah penyakit yang termasuk dalam kategori pandemi adalah penyakit menular dan memiliki garis penularan yang berkesinambungan.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif kualitatif dengan maksud untuk mengungkapkan secara komprehensif dan alami bagaimana pola komunikasi birokrasi dalam penanganan pandemi Covid-19 beserta pendukung

dan penghambatnya di Kabupaten Garut dengan Satuan Tugas Covid-19 Garut sebagai implementor.

**PEMBAHASAN**

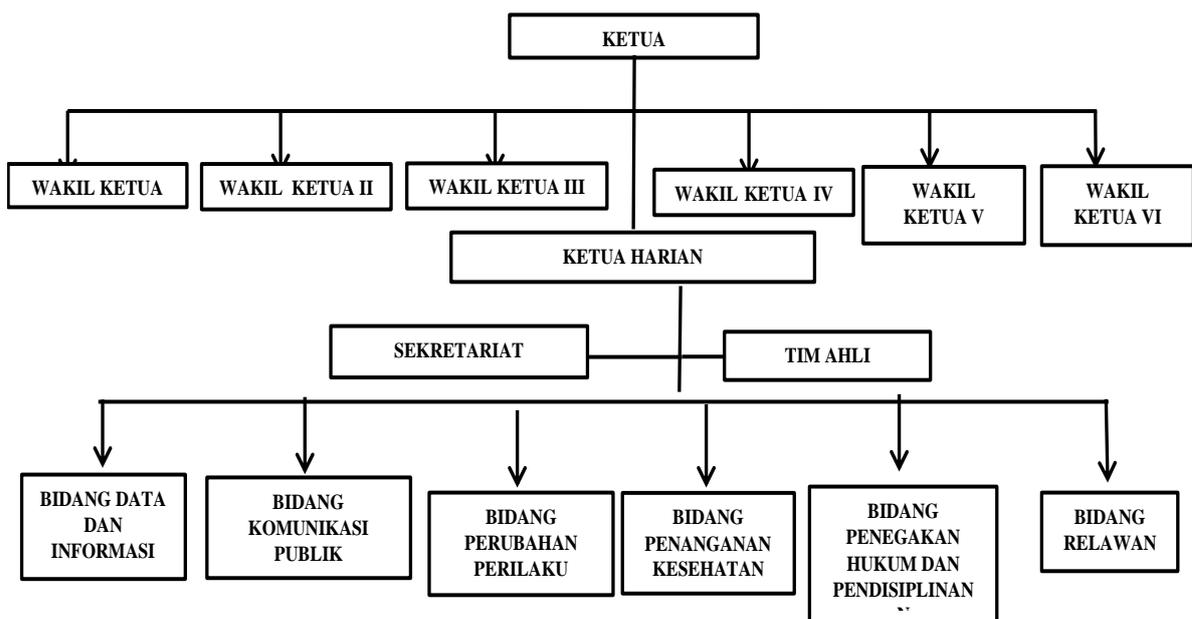
**Gambaran Umum Kabupaten Garut**

Kabupaten Garut terletak di Proinsi Jawa Barat bagian Selatan pada koordinat 6°56'49" - 7 °45'00" Lintang Selatan dan 107°25'8" - 108°7'30" Bujur Timur. Kabupaten Garut memiliki luas wilayah administratif sebesar 307,407 Ha (3.074,07 km<sup>2</sup>). Kabupaten Garut terletak dekat dengan Kota Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat, dan merupakan buffer zone dan hinterland bagi pengembangan wilayah Bandung Raya. Oleh karena itu, Kabupaten Garut memiliki posisi yang strategis dalam

memenuhi kebutuhan warga Kota dan Kabupaten Bandung, serta berperan dalam mengendalikan keseimbangan lingkungan.

**Tugas dan Fungsi Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Garut**

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Merupakan tujuan utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk diwujudkan dan dilaksanakan, dan merupakan kesatuan tugas pokok dan fungsi yang saling berkaitan. Adapun Tupoksi Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Garut berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor 443-3/Kep.868-Bpbd/2020 Tanggal 30-9-2020. Berikut adalah struktur Satgas Covid-19 Garut ( BPBD Garut, 2021 ) :



Sumber : BPBD Garut 2021

**Impersonalitas Hubungan**

Selama PPKM darurat berlangsung, Satgas Covid-19 Garut terus bergerilya blusukan membagikan paket bansos yang berupa sembako Dipimpin Kapolres Garut, Kajari, dan Dandim 0611 Garut serta unsur Forkopimda Garut, mereka sengaja mengetuk rumah pasien yang tengah melakukan isoman satu per satu, di zona merah Covid-19 , terutama

di kawasan padat penduduk sebagai ikhtiar Satgas Covid-19 untuk meringankan beban masyarakat, terutama pasien Covid-19 yang tengah menjalani isolasi mandiri saat PPKM Darurat. Saat ini, perkembangan Satgas COVID-19 Garut menunjukkan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan Kabupaten Garut di Jawa Barat telah memasuki penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2

dari Level 3 agar selama masa COVID- 19 pandemi.

gabungan dari berbagai instansi dengan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dalam struktur tugas, sebagai berikut :

**Kemampuan teknis**

Adapun struktur Satgas COVID-19 kabupaten Garut merupakan

**Tabel. 4.1 Susunan Satgas Covid Garut dari BPBD**

No	Jabatan Pada Pemerintah Daerah	Kepanitiaan Satgas Covid-19 Garut	Jumlah/ Orang
1.	Bupati Garut	Ketua	1
2.	Sekda selaku Kepala BPBD Kepala Pelaksana BPBD	Ketua Harian  Sekretaris	2
3	Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekontruksi pada BPBD Kepala Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kepala bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD	Bidang Relawan ( Anggota )	3
4	Sekretaris Pada BPBD	Staf Sekretariat Koordinator	10

Sumber : BPBD 2021

**Tabel. 4.2 Susunan Satgas Covid Garut dari Dina Kesehatan Garut**

Rumpun	Sub Rumpun	RUMAH SAKIT		PUSKESMAS		Swasta		JUMLAH		Jumlah
		Jenis Kelamin		JK		JK		JK		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
Tenaga Kesehatan	Medis	134	80	57	115	10 4	10 4	295	299	594
	Psikologi Klinis	0	1	0	0	0	2	0	3	3
	Keperawatan	541	690	642	532	85	12 8	126 8	135 0	2618
	Kebidanan	1	212	0	1212	1	84	2	150 8	1510
	Kefarmasian	21	78	39	86	32	66	92	230	322
	Kesehatan Masyarakat	5	6	35	48	15	5	55	59	114
	Kesehatan Lingkungan	4	5	12	31	0	0	16	36	52
	Gizi	1	14	4	37	0	5	5	56	61
	Keterapian Fisik	8	9	0	0	2	1	10	10	20
	Keteknisian Medis	19	36	35	102	2	7	56	145	201
	Teknik Biomedika	65	81	20	70	15	27	100	178	278
	Kesehatan Tradisional	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nakes lainnya	2	2	10	11	4	5	16	18	34	
Asisten Tenaga Kesehatan	Keperawatan	4	13	7	6	28	36	39	55	94
	Kebidanan	0	3	0	19	0	22	0	44	44
	Kefarmasian	8	30	11	28	12	66	31	124	155
	Teknik Biomedika	2	5	2	1	10	27	14	33	47

	Kesehatan Lingkungan	0	1	1	0	0	2	1	3	4
	Gizi	4	0	1	2	0	1	5	3	8
	Keteknisian Medis	2	0	5	10	1	0	8	10	18
JUMLAH		821	126 6	881	2310	31 1	58 8	201 3	416 4	6177

Sumber : Dinas Kesehatan Garut, 2021

### Karier

Satuan Tugas covid -19 daerah yang bekerja dengan sangat berat dalam rangka pelayanan publik seperti Tenaga Kesehatan (Nakes) menjadi garda terdepan dalam memerangi penyebaran Covid-19. Pemerintah pusat telah merumuskan kebijakan pemberian tunjangan khusus karena tenaga kesehatan sebagai penjaga rela mengorbankan diri untuk mengabdikan kepada negara dan negara dalam rangka memutus mata rantai penularan virus corona. Pemerintah sendiri menggagalkan 4,17 triliun untuk tunjangan tenaga kerja kesehatan satgas Covid-19 daerah dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.3 Tunjangan Tenaga Kerja Kesehatan Satgas Covid-19 Kabupaten Garut**

Tenaga Kerja	Tunjangan
Dokter Spesialis	Rp. 15.000.000
Dokter Umum	Rp. 10.000.000
Perawat	Rp. 7.000.000
Non Kesehatan	Rp. 5.000.000
Santunan Kematian	Rp. 300.000.000

Sumber : Detik. 2020

Hal ini sebagai tanda terimakasih dari pemerintah kepada para nakes yang telah menjadi garda terdepan dalam pandemi ini sehingga kondisi di kabupaten Garut angka kematian sudah menurun dan masuk level 2 dengan harapan wabah ini segera berakhir disertai tunjangan untuk sumber daya manusia satuan tugas Covid- 19 lainnya ( Dinas terkait ) yang terlibat langsung di dalam implementasi

di lapangan yang bekerja untuk menangani dan mencegah pandemi ini. Pada dasarnya reward berkontribusi pada penerapan anggaran berbasis kinerja, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan profesionalisme terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Arinda, 2020 ).

### Pola Komunikasi Satgas Covid-19 dalam Penanganan dan Pencegahan Pandemi di Kabupaten Garut

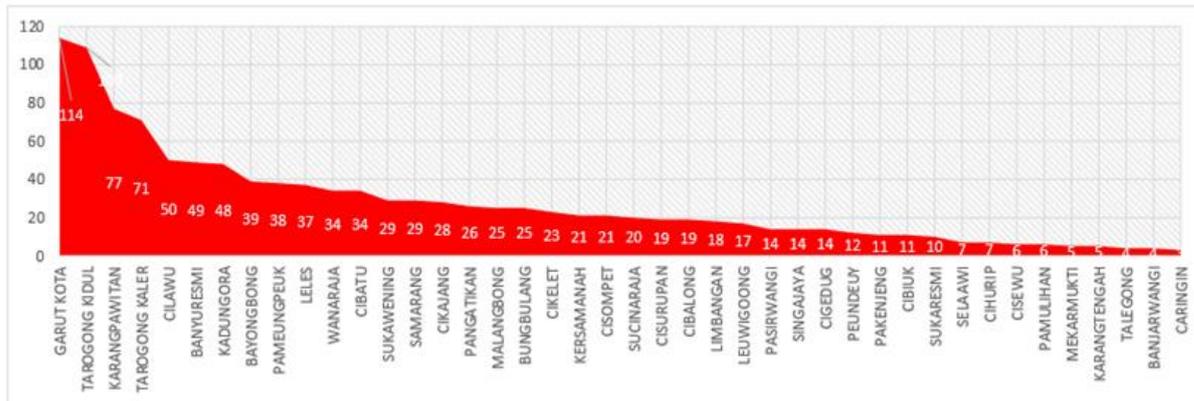
Komunikasi vertikal dilaksanakan dalam bentuk rapat laporan rutin setiap hari senin di apel pagi saat rapat Satuan Tugas Covid-19 Garut melalui forum Forkopimda. Hal ini bersifat rutin yang dilaksanakan setiap minggu. Komunikasi horizontal dilakukan dalam rangka koordinasi antar instansi maupun bagian- bagian lain dalam satgas covid-19 Garut, seperti pada saat turun kebijakan dari pusat kemudian ketua ( Bupati ) mengintruksikan hal tersebut. Bagian hukum akan membuat rencana aksi sesuai dengan petunjuk dari ketua yang dilanjutkan dengan penyebaran informasi baik oleh kominfo maupun BPBD sesuai arahan dari ketua. Sinergi inilah yang telah menampakkan hasil kinerja semua elemen yang terlibat dalam penanganan dan pencegahan pandemi covid-19 terutama dengan dibentuknya satgas Covid-19 Kabupaten Garut. Pelatihan dan penguatan profesionalisme terus dilakukan secara virtual kepada tingkat pimpinan bagian sebagai langkah memahami maksud dari semua petunjuk dari kebijakan pemerintah.

### **Capaian kinerja Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Garut**

Jumlah Wilayah Administratif Kabupaten Garut adalah 42 Kecamatan, 21 Kelurahan, 421 Desa, 4.231 RW, dan 15.621 RT. Pada saat Level 4, sebagian besar kematian terjadi di RS (79,3%) terutama di bulan Juni dan Juli. Sebesar 70,9% kematian di RS terjadi lebih dari 3 hari perawatan, namun pandemi gelombang kedua (Juni-Juli) kematian di RS terjadi di hari pertama (IGD) 47%. Paling banyak (82%) kematian diakibatkan Riwayat komorbid menurut Umur 74% terjadi pada usia > 50 tahun, namun terjadi pergeseran dengan adanya varian Delta ke Usia Produktif (20-50 thn). BPBD Garut). Saat level 4, Satgas Covid-19 Kabupaten Garut mencatat terdapat sebanyak 58 desa di Kabupaten Garut yang masih berstatus zona merah penyebaran Covid-19. Munculnya kluster keluarga ditelusuri melalui kontak dekat dengan pasien masa lalu, sehingga saat ini muncul kluster baru, yaitu kluster pesantren, kluster rumah sakit swasta, puskesmas, dan kluster keluarga. Karena itu, menurut kajian Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, seluruh tim satgas harus tetap waspada. Sebab, penyebaran Covid-19 akan terus terjadi, seperti kluster pesantren, kluster rumah sakit swasta, puskesmas, dan kluster keluarga. Karena itu, berdasarkan wawancara dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, seluruh tim satgas harus tetap waspada. Karena penyebaran Covid-19 akan terus berlanjut.

Melalui pola komunikasi birokrasi vertikal dan horizontal dalam Satgas Covid -19 Garut telah mampu berupaya maksimal untuk menangani

dan mencegah pandemi ini begitu pula sosialisasi yang intens kepada masyarakat yang menjadi tujuan pelayanan publik. Saat ini masyarakat di daerah Kabupaten Garut sudah menyadari manfaat setelah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Banyak orang ingin divaksinasi untuk mencegah efek negatif dari penyebaran virus, yang membuktikan hal ini. Kesadaran masyarakat adalah bahwa pemerintah percaya bahwa salah satu syarat kesehatan adalah vaksinasi. Pemkab Garut bekerja sama dengan anggota TNI dan Polri untuk mempercepat vaksinasi di setiap Puskesmas dan balai vaksinasi lainnya (seperti pendopo dan tempat lainnya). Setiap pelaksanaan vaksinasi, Antusiasme masyarakat cukup tinggi, dan sepertinya selalu ada antrean panjang untuk menunggu pemeriksaan, menunggu giliran untuk divaksinasi COVID-19. Masyarakat sadar ingin divaksinasi karena menilai vaksin tersebut dapat meminimalisir risiko serius jika terpapar wabah COVID-19. Beberapa dari mereka telah divaksinasi. Bagi peserta yang akan mengikuti vaksinasi, selain mendownload, membuat akun dan mengisi data di aplikasi Peduli Protect, peserta juga dapat mendaftar melalui website West Java Vaccine Center, dan warga dihimbau untuk mendaftar terlebih dahulu. Inilah salah satu bentuk komunikasi persuasif pada masyarakat dalam upaya menangani dan mencegah penularan pandemi covid-19 di Kabupaten Garut. Perubahan dari level 4 ke level 2 tentu merupakan sebuah kondisi yang diharapkan sejak semula oleh semua pihak hingga pandemi ini nantinya nanti berakhir



Gambar 6. Trend Penurunan kematian pandemi Covid-19 per-kecamatan Kabupaten Garut ( BPBD, 2021)

## KESIMPULAN

Tugas Penanganan COVID-19 yang berada di bawah Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Melalui pola komunikasi birokrasi vertikal dan horizontal dalam Satgas Covid -19 Garut telah mampu berupaya maksimal untuk menangani dan mencegah pandemi ini begitu pula sosialisasi yang intens kepada masyarakat yang menjadi tujuan pelayanan publik. Capaian kinerja Satgas Covid-19 Garut terlihat pada perubahan dari level 4 ke level 2 tentu merupakan sebuah kondisi yang diharapkan sejak semula oleh semua pihak hingga pandemi ini saatnya nanti berakhir.

## DAFTAR PUSTAKA

A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Cetakan Pertama, P.T. Remaja Rosda karya, Bandung

Abidin, Said Zainal . 2008 Kebijakan Publik. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika

Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia, Gava Media, Yogyakarta.

Ardiyanti, Handrini. 2020. Komunikasi Pemerintahan Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis. Vol. XII, No.15/1/Puslit/Agustus/2020. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Arinda, Carina Puspita (2020) Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Profesionalisme Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Other thesis, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.

Arni, Muhammad. (2005). Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Djamarah, Bahri Syaiful. 2004. Pola Komunikasi Orang Tua & Anak Dalam keluarga. Jakarta: PT. Reneka Cipta.

Juwari, Ahmad, 2017. Birokrasi dan Sense of Crisis di Masa Pandemi. Analisis Akuntabilitas Badan Kepegawaian Negara. <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2017/10>

Katz, Daniel dan Robert L. Kahn. 1966. Organizations and The System Concept, dalam Shafritz, Jay M dan J. Steven Ott. 1987. Classics of Organization Theory

Risnawan, Wawan, 2018, Manajemen Strategik Birokrasi Dalam Era Disruption, Jurnal Ilmu Administarasi Publik (Dinamika) Vol. 5, No.4.

Panuju, Redi, 1999, Manejemen Humas, Tinjauan Teori dan Praktek, Remaja Rosda Karya, Bandung

Santi, Melissa. Ferry Koagouw.2015. Pola Komunikasi Anak-Anak Delinkuen Pada

## **Mulyaningsih**

*Pola Komunikasi Birokrasi Satgas Covid -19 Kabupaten Garut Dalam Penanganan.....(Hal 1838-1853)*

- Keluarga Broken Home Di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado.  
eprints.umm.ac.id/36996/4/jiptumpp-gdl-mayadamaya-51770-9-pendahul-n.pdf
- Siregar, Liper. 2011. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Apbd Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Moderator Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar, Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara
- Sendjaja, S. Djuarsa. 1994. Teori Komunikasi. Jakarta: Universitas Terbuka
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta
- Supriatna, Tjahya, 1996, "Administrasi Birokrasi dan Pelayanan Publik", Jakarta : Nimas Sultima, 1997, Birokrasi, "Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan", Bandung, Humaniora Utama Press.
- Susanto, Eko Harry, 2010 Kelambanan Reformasi Birokrasi dan Pola Komunikasi Lembaga Pemerintah, Jurnal ASPIKOM, Vol 1 No 1 2010
- T. Taufik, Warsono, H. 2020, Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19, Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, vol. 2, no. 1, pp. 1-18, Jun.  
<https://doi.org/10.14710/dialogue.v2i1.8182>
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
- Keputusan Bupati Garut Nomor 443-3/Kep.868-Bpbd/2020 Tanggal 30-9-2020
- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/18/150000269/pandemi-apa-itu>
- <https://garutkab.bps.go.id>
- <https://www.wartaekonomi.co.id/read285180/bansos...>
- <http://sipinter.bappeda.garutkab.go.id/doc-sipinter/Kajian-Potensi-Unggulan-BPMPT-2015.pdf>
- <https://covid19.garutkab.go.id>
- [https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/besaran.](https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/besaran)
- [https://www.detik.com/tag/insentif-nakes-covid\\_19](https://www.detik.com/tag/insentif-nakes-covid_19)
- <https://www.wartaekonomi.co.id/tag-4221/garut>
- <https://www.menpan.go.id>
- <https://www.bps.go.id>